

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan gejala global yang terjadi di Indonesia, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kemiskinan biasanya dicirikan dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat atau individu dalam proses pengambilan keputusan baik dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya. Oleh karenanya kemiskinan menjadi konsep yang dinamis. Banyak ahli mendefinisikan dalam konteks yang berbeda satu dengan yang lainnya, namun konsep dasarnya jelas, yaitu ketidakmampuan mengatasi kehidupan yaitu mencukupi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan (Kertati, 2013).

Menurut Chambers (Suryawati, 2005), menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *Integrated Concept* yang mempunyai lima dimensi, yaitu (1) kemiskinan (*proper*); (2) ketidakberdayaan (*powerless*); (3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*); (4) ketergantungan (*dependence*); dan (5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang mempunyai pendapatannya dibawah garis kemiskinan yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya untuk kebutuhan sandang, pangan dan papan (kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal). Kemiskinan juga dikarenakan oleh sikap seseorang yang tidak ingin merubah keadaannya menjadi lebih baik, malas untuk bekerja dan malas untuk belajar sehingga pendidikannya rendah, tidak mempunyai kreatif, tidak mempunyai motivasi pada dirinya, keterbatasan modal untuk membangun usaha harus ketergantungan pada usaha orang lain, tidak mempunyai skill atau keterampilan. Selain itu, kemiskinan juga disebabkan oleh kelangkaan sumber daya alam, sarana dan prasarana, serta keadaan tanah yang tandus.

Untuk mengukur kemiskinan di Indonesia, BPS menggunakan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Masyarakat penduduk miskin mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan menurut BPS merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang

setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan non makanan merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, kesehatan, dan pendidikan. Pengukuran kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*) tidak hanya digunakan oleh BPS tetapi juga oleh negara-negara lain, seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone dan Gambia.

Tabel 1.1
Indikator Kemiskinan di Kota Semarang 2012 - 2015

No	Indikator Kemiskinan	Indikator Kemiskinan			
		2012	2013	2014	2015
1	Garis kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	297.848	328.271	348.824	368.477
2	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	83.346	86.734	448.398	384.854
3	Persentase	5.13	5.25	5.04	4.97

Sumber: BPS Kota Semarang

Secara garis besar, indikator kemiskinan di Kota Semarang dari tahun 2012 hingga tahun 2015 mengalami ketidakstabilan, seperti pada tabel 1.1 pada tahun 2012 memiliki persentase indikator kemiskinan sebesar 5.13, garis kemiskinan dengan jumlah 297.848 rata-rata per kapita perbulan dan jumlah penduduk miskin dengan jumlah 83.346 jiwa. Pada tahun 2013 memiliki persentase indikator kemiskinan sebesar 5.25, garis kemiskinan dengan jumlah 328.271 rata-rata per kapita perbulan dan jumlah penduduk miskin dengan jumlah 86.734 jiwa. Pada tahun 2014 mengalami penurunan pada persentase indikator kemiskinan sebesar 5.04, garis kemiskinan dengan jumlah 348.824 rata-rata per kapita perbulan dan jumlah penduduk miskin dengan jumlah 84.680 jiwa. Pada tahun 2015 mengalami penurunan pada persentase indikator kemiskinan sebesar 4.97, garis kemiskinan yang semakin meningkat dengan jumlah 368.82477 rata-rata per kapita perbulan dan jumlah penduduk miskin dengan jumlah 84.270 jiwa.

Menurut laporan verifikasi yang dikeluarkan oleh BAPPEDA Kota Semarang jumlah warga miskin yang ada di Kota Semarang sebanyak 114. 939 Kepala Keluarga atau 367.848 jiwa dan jumlah tersebut telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 050 / 680 / 2015 tanggal 25 Juli 2015 tentang Penetapan Database Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2015. Sebagai Ibu Kota Provinsi jumlah penduduk miskin di Kota Semarang termasuk kecil apabila dibandingkan dengan kota lainnya di Indonesia. Jumlah penduduk miskin Kota Semarang berdasarkan perhitungan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) adalah terendah di Jawa Tengah.

PPLS merupakan Pendataan program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh BPS bertujuan untuk melakukan pemutakhiran (update) data rumah tangga sasaran bantuan langsung tunai, yang digunakan oleh pemerintah untuk beberapa program perlindungan sosial, seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), program keluarga harapan (PKH), Beras untuk Orang Miskin (Raskin), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), dan program-program lainnya.

Penduduk miskin Kota Semarang termasuk dalam prioritas 3, yaitu berada dibawah garis kemiskinan atau tepat dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GNKM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GNKM) merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini dimungkinkan karena Kota Semarang memiliki infrastruktur yang memadai, lapangan kerja yang terbuka, jumlah perusahaan yang banyak serta jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai. Berdasarkan pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) persentase jumlah penduduk miskin di Kota Semarang pada tahun 2015 adalah sekitar 8,15% atau sebanyak 81,25 ribu jiwa, pada tahun 2016 persentase jumlah penduduk miskin di Kota Semarang adalah sekitar 7,99% atau sebanyak 80,72 ribu jiwa dan pada tahun 2017 persentase jumlah penduduk miskin di Kota Semarang adalah sekitar 7,78% atau sebanyak 79,66 ribu jiwa. Jumlah ini merupakan jumlah penduduk miskin terkecil di Jawa tengah, bahkan berada di bawah rata-rata Jawa Tengah dan nasional.

Fenomena kemiskinan ini merupakan suatu fakta yang menunjukkan bahwa pembangunan yang telah dilakukan belum mampu meredam meingkatnya jumlah penduduk miskin. Diperkirakan ada yang kurang tepat dalam perumusan dan implementasi kebijakan untuk memberantas kemiskinan dan memberdayakan penduduk miskin. Selama ini kemiskinan lebih sering dikaitkan dengan dimensi ekonomi karena dimensi inilah yang paling mudah diamati, diukur dan diperbandingkan. Padahal kemiskinan berkaitan juga dengan berbagai dimensi antara lain dimensi sosial, budaya, sosial politik, lingkungan (alam dan geografis), kesehatan, pendidikan agama, dan budi pekerti. Menelaah kemiskinan secara multidimensional sangat diperlukan untuk perumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan (Suharto, 2006).

Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, namun dalam perkembangannya tingkat kemiskinan di Kota Semarang masih cenderung tinggi, maka pemerintah mempunyai program penanggulangan kemiskinan yaitu program E-Warong yang singkatannya dari Elektronik Warung Gotong Royong yang diluncurkan pada tanggal 29 November 2016. Adapun sasarannya yaitu mengidentifikasi kondisi kemiskinan masyarakat sebelum program E-Warong di Kota Semarang, mengidentifikasi karakteristik peranan E-Warong dalam penanganan kemiskinan di Kota Semarang, menganalisis peranan E-Warong dalam penanganan kemiskinan di Kota Semarang, dan merumuskan kesimpulan dan rekomendasi bagi peranan e-warong dalam penanganan kemiskinan di Kota Semarang.

Tujuan adanya program e-Warong ini agar membantu menurunkan angka kemiskinan, upaya membangkitkan kembali semangat gotong royong masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan, dan harga sembako di e-warong lebih rendah dari pada harga pasar. Permensos (peraturan menteri sosial) No 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha melalui e-Warong menyebutkan fungsi e-warong yaitu sebagai tempat bahan pangan murah berkualitas dan kebutuhan pangan rumah tangga, agen bank penyalur bansos non tunai, tempat pemasaran hasil produksi Kube, dan tempat layanan koperasi simpan pinjam.

Sehubungan dengan hal itu maka perlu dikaji peranan e-warong dalam penanganan kemiskinan di Kota Semarang. Berdasarkan kondisi diatas, maka timbul suatu pertanyaan penelitian (*research question*) dalam studi ini, yaitu: **“Bagaimana peranan e-warong dalam penanganan kemiskinan di Kota Semarang?”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan pemerintah Kota Semarang perlu adanya keseimbangan pendapatan, pemasukan dan pengeluaran masyarakat serta perlu diketahui kondisi masyarakat miskin sebelum adanya program E-Warong dan mengetahui kondisi masyarakat miskin setelah adanya program e-warong yang dapat mendukung dan menekan angka kemiskinan di Kota Semarang, mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat program e-warong dan menganalisis karakteristik peranan e-warong dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran dalam penulisan Proyek Akhir ini sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari pembuatan laporan ini yaitu mengetahui peranan e-warong dalam penanganan kemiskinan di Kota Semarang.

1.3.2 Sasaran

Adapun sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kondisi kemiskinan masyarakat sebelum adanya program E-Warong dan setelah adanya program E-Warong.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat program e-warong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Semarang.
3. Menganalisis karakteristik peranan E-Warong dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang.

1.4 Ruang Lingkup

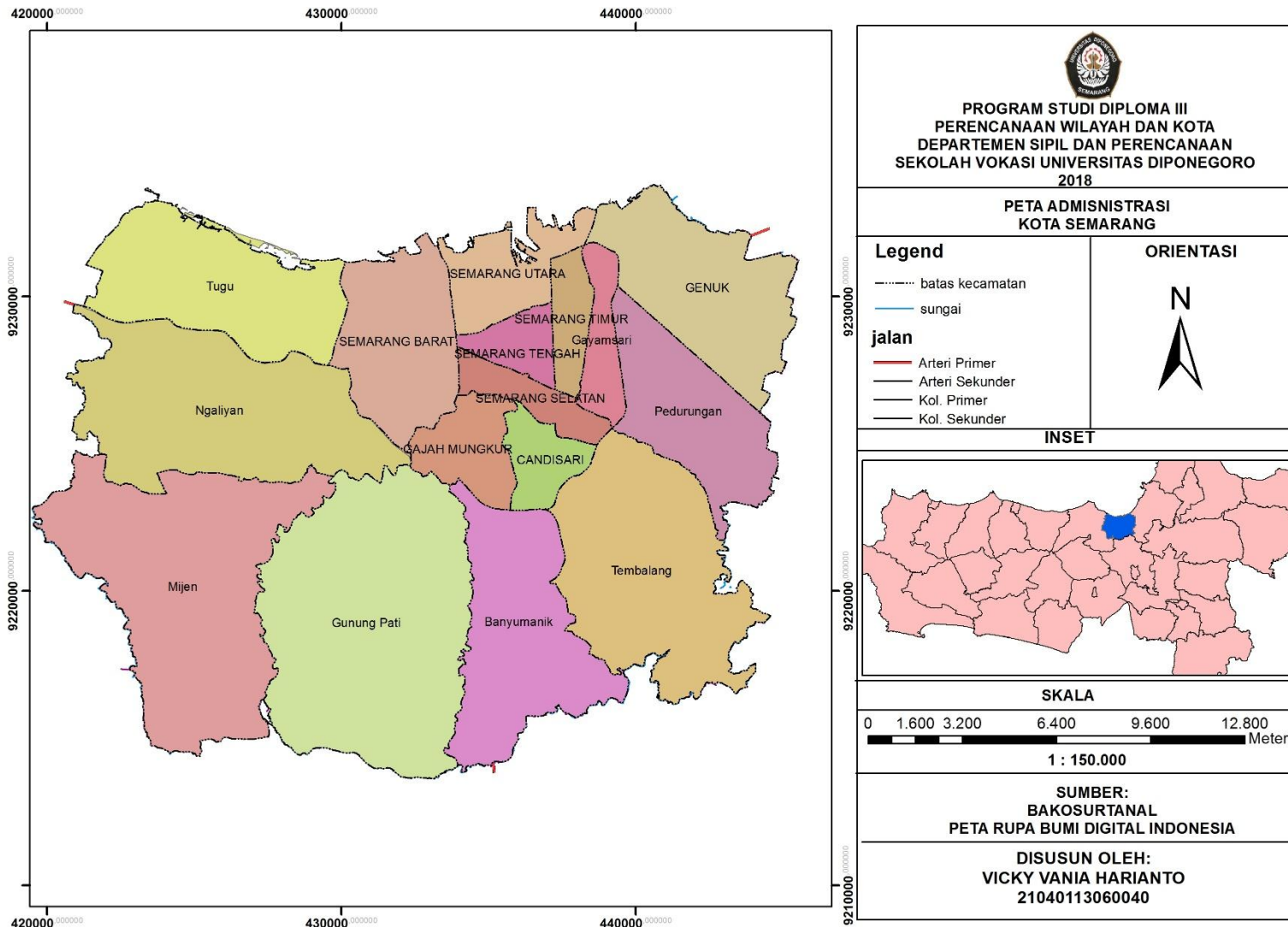
Adapun ruang lingkup yang dibahas dalam laporan ini adalah meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah yang dibahas dalam laporan ini meliputi ruang lingkup wilayah yaitu Kota Semarang.

Ruang lingkup wilayah Kota Semarang dengan luas wilayah 373,70 Km². Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Kota Semarang memiliki posisi astronomi diantara garis 6 °50' – 7 °10' Lintang Selatan dan garis 109 °35' - 110 °50' Bujur Timur. Batas wilayah administratif Kota Semarang sebagai berikut.

Utara	: Laut Jawa
Timur	: Kabupaten Demak
Barat	: Kabupaten Kendal
Selatan	: Kabupaten Semarang



Sumber : Peta Administrasi diolah pribadi
Gambar 1.1 : Peta Kota Semarang

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan e-warong pada penanggulangan kemiskinan Kota Semarang. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibuat pembahasan yang dikaji pada penelitian ini. Berikut ini adalah ruang lingkup materi dalam penelitian yaitu:

- a. Mengidentifikasi kondisi kemiskinan masyarakat sebelum adanya program E-Warong dan setelah adanya program E-Warong

Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi perekonomian masyarakat Kota Semarang terkait dengan adanya bantuan-bantuan sosial dari pemerintah yang disediakan sebelum adanya program e-warong dan perbandingan kondisi perekonomian masyarakat setelah adanya program e-warong.

- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat program e-warong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Semarang.

Tujuannya adalah mengetahui apa saja faktor yang mendorong agar berjalan dengan baik program E-Warong dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan mengetahui faktor yang menghambat terjadinya masalah pada program e-warong dalam mensejahterakan masyarakat miskin.

- c. Menganalisis karakteristik peranan e-warong dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang

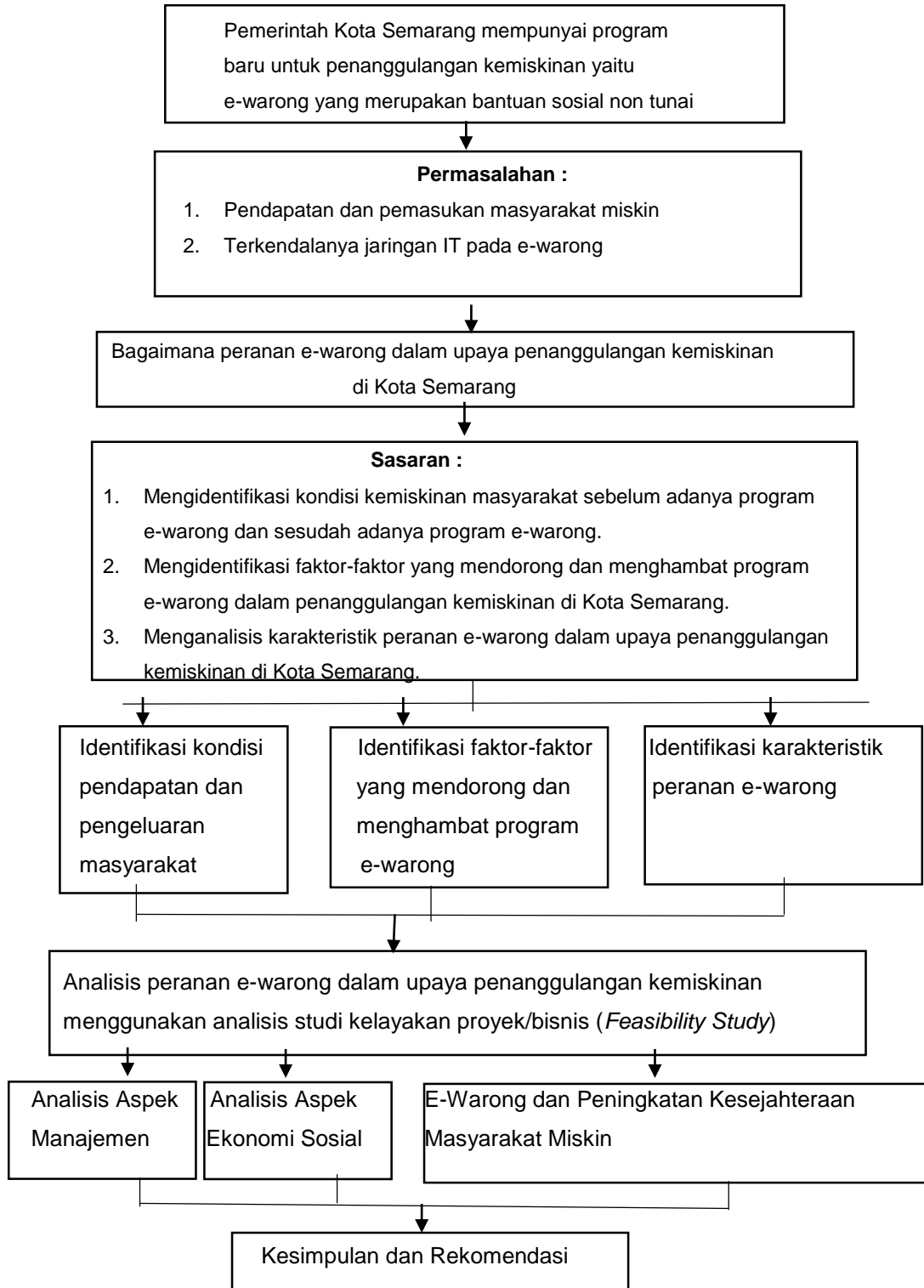
Tujuannya adalah mengetahui karakteristik non fisik terkait dengan peran dan fungsi e-warong, kegiatan e-warong dan kesejahteraan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang

1.5 Kerangka Pikir

E-Warong merupakan program Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama program ini pengalihan bantuan sosial tunai ke bantuan sosial non tunai berbasis digital. Tujuannya pemerintah diadakannya program ini ialah meningkatkan efektivitas bantuan sosial dan memperluas cakupan pelayanan keuangan inklusif. Dengan program e-warong ini diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan dapat memudahkan masyarakat untuk bertransaksi belanja di e-warong.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan e-warong untuk menanggulangi warga miskin di Kota Semarang. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut maka diperlukan suatu kajian literatur terkait untuk memberikan dasar dan landasan dalam melakukan penelitian. Kegiatan pengidentifikasian dilakukan

dalam beberapa tahapan untuk menghasilkan hasil studi berupa hasil dari peranan e-warong dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang. Berikut ini adalah kerangka pikir dalam penyusunan penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.5



1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Proyek Akhir ini terdiri dari lima bab dan selanjutnya bab-bab tersebut dibagi beberapa sub bab sebagai penjelasan. Adapun sistematika penulisan proyek akhir dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup wilayah dan materi, dan sistematika pembahasan.

BAB 2 KAJIAN LITERATUR

Bab ini membahas tentang teori atau kajian dari metode-metode yang akan dibahas dalam laporan ini.

BAB 3 GAMBARAN UMUM

Bab ini membahas tentang gambaran umum Kota Semarang, sejarah berdirinya dan tujuan program e-warong secara umum, dasar-dasar hukum, visi dan misi, proses pembentukan e-warong, pendistribusian e-warong terhadap penerima program, serta gambaran mekanisme program e-warong.

BAB 4 ANALISIS

Bab ini berisi tentang analisis- analisis dari pembahasan mengenai program e-warong yang telah diolah.

BAB 5 KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis yang telah diolah secara ringkas dan saran untuk perkembangan maupun perbaikan dalam penerapan program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini berisi tentang referensi-referensi yang penulis jadikan sebagai bahan acuan dalam pembuatan Proyek Akhir ini.

LAMPIRAN

Berisikan data-data yang mendukung peneliti dalam menganalisis tentang kemiskinan, kesejahteraan, serta penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Semarang.